



RENCANA KERJA

Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2017

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017 mengacu pada kerangka arahan dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021 dan Renstra Bappeda 2016 – 2021.

Tersusunnya Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Ir. SUDARYONO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 199002 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD yang disusun mendasari pada Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang 2017 dengan memperhatikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra SKPD 2016 – 2021.

Dalam penyusunannya renja Bappeda Kabupaten Pemalang tidak lepas dari target kinerja yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Bappeda tahun 2016-2021 dan juga dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2016 serta perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi yang terkait dengan proses penyusunan Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan hasil kinerja Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2016 akan diketahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui juga permasalahan serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun, hasil kinerja ini juga dapat menjadi dasar proyeksi pelaksanaan kinerja ditahun berjalan (2016) serta tahun perencanaan (2017), disamping itu adanya dinamika dalam pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi faktor eksetranal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah, salah satu dinamika yang ada diantaranya adalah berlakukanya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, UU tentang desa dan juga dengan pelaksanaan RPJMN 2014-2019 yang secara langsung akan berdampak pada Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas kebijakan pembangunan tahunan bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2017 akan diarahkan pada pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang tahu 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Pemalag 2016-2021 serta dalam upaya sinkronisasi kebijakan baik di tingkat nasional, regional maupun tingkat kabupaten terkait dengan dinamika perkembangan kebijakan pembangunan daerah, disamping itu Renja Bappeda Kabupaten Pemalang tahun 2017 ini juga disusun dengan memperhatikan asumsi kinerja jangka menengah kabupaten pemalang tahun 2016-2021 mengingat tahun 2017 merupakan tahun-tahun awal pencapaian RPJMD 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2017, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
17. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
20. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Taknis Daerah Kabupaten Pemalang.
25. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021
26. Peraturan Bupati Pemalang No. 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Bappeda yang disusun dengan mengacu pada Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, yang didalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam kurun waktu mulai tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun bagi seluruh komponen Bappeda di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan an sasaran yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan

upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Atas dasar itu maka RenjaBAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan acuan resmi bagi BAPPEDA Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan kegiatan selama setahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Pemalang.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BAPPEDA Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN :

Sistematika penulisan Rencana KerjaBAPPEDA Kabupaten Pemalang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

III. TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2015 (n-1) merupakan tahun berjalan dengan tahun pembuatan rencana kerja tahun 2016 (n), sehingga realisasi capaian target Renjanya masih sebatas perkiraan. Evaluasi realisasi capaian target Renja ini juga melihat secara akumulatif dari tahun awal Renstra SKPD (n-2 dan n-3), untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program-program dan kegiatan-kegiatan kerja yang telah direncanakan. Dengan begitu SKPD dapat mengetahui program/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Gambaran umum kondisi Bappeda Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sebagai dasar evaluasi rencana kerja adalah sebagai berikut : (terlampir)

2.1.1 Realisasi program/kegiatan Tahun 2016 yang tidak memenuhi target

Berdasarkan tabel 2 dapat digambarkan bahwa secara umum capaian kinerja program / kegiatan di Bappeda Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 dapat mencapai 100%, di lihat dari realisasi anggaran tahun 2016 beberapa kegiatan dapat melaksanakan efisiensi anggaran sehingga meskipun realisasi anggaran kurang dari 80 % namun capaian program / kegiatan dapat tercapai 100%. Beberapa program dan kegiatan dengan realisasi anggaran < 80% tersebut diantaranya adalah :

- a. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, Pencapaian kegiatan ini adalah sebesar 75,60%, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Program Perencanaan Tata Ruang, kegiatan Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang Pencapaian kegiatan ini adalah sebesar 76,59%, kurangnya pencapaian target disebabkan karena Proses Penetapan Perda Perubahan RTRW yang masih dalam persetujuan substansi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- c. Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan perumahan dan kegiatan Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan, Pencapaian kegiatan ini adalah sebesar 61,25% dan 64,37%, kurangnya pencapaian target

disebabkan karena adanya efisiensi penyelenggaraan koordinasi tingkat nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Rincian anggaran dan realisasi target kinerja semua kegiatan di Bappeda Kabupaten Pematang Jaya adalah secara fisik realisasi dari target kinerja adalah 100%, namun secara anggaran realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

No.	BELANJA	Anggaran	Realisasi
A.	Sebelum Perubahan		
	1. Belanja Langsung	9.432.931.500	5.320.719.014
	2. Belanja Tidak Langsung	4.032.704.000	2.622.450.833
	JUMLAH	13.465.635.500	7.943.169.847
B.	Setelah Perubahan		
	1. Belanja Langsung	12.728.675.000	11.776.738.942
	2. Belanja Tidak Langsung	4.027.649.000	3.725.727.816
	JUMLAH	16.756.324.000	15.502.466.758

Secara rinci realisasi program / kegiatan Bappeda Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	Penyediaan jasa surat menyurat	85.000.000	79.835.000	93,92
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	170.000.000	166.212.762	97,77
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	9.000.000	7.276.950	80,86
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	75.000.000	73.560.800	98,39
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	66.000.000	62.478.727	94,66
6	Penyediaan alat tulis kantor	85.000.000	84.400.150	99,29
7	Penyediaan barang cetakan dan	54.000.000	49.629.300	91,91

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	penggandaan			
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	150.000.000	148.787.400	99,19
9	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	175.000.000	165.827.343	94,76
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	29.659.300	98,86
11	Penyediaan makanan dan minuman	130.000.000	129.219.469	99,40
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	722.660.000	639.603.967	88,51
13	Penyediaan jasa keamanan	80.000.000	79.360.000	99,20

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	655.000.000	641.076.000	97,87
2.	Pengadaan computer dan perlengkapannya	250.000.000	233.761.580	93,50
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	125.000.000	122.122.420	97,70
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000	188.346.443	94,17
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000	98.131.500	98,13

3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	97.500.000	79.250.000	81,28
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60.000.000	45.360.000	75,60
3.	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	75.000.000	70.749.620	94,33

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.700.000	9.615.500	99,13
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	25.000.000	23.681.625	94,73
3.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	28.000.000	27.893.600	99,62

5. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan data base perencanaan SKPD	326.600.000	304.067.250	93,10

6. Program pengembangan data/informasi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	440.000.000	433.520.000	98,53
2.	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah	445.550.000	392.960.862	88,20
3.	Penyusunan Sistem Informasi Profile Daerah	140.000.000	130.773.000	93,41

7. Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	232.370.000	223.240.000	96,07

8. Program Perencanaan Tata Ruang

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	523.127.500	464.341.481	88,76
2.	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	671.810.000	600.698.764	89,41
3.	Rapat Koordinasi tentang rencana tata ruang	260.270.000	199.336.984	76,59

9. Program Kerjasama pembangunan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga	354.907.500	341.866.900	96,33
2.	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya	995.000.000	927.776.569	93,24
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	213.320.000	179.651.100	84,22

10. Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	111.247.500	68.144.346	61,25
2.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	228.600.000	147.152.111	64,37

11. Program perencanaan pembangunan daerah

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	385.000.000	351.287.535	91,24
2.	Penyusunan rancangan RPJMD	166.975.000	160.646.000	96,21
3.	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	95.200.000	84.911.500	89,19
4.	Penetapan RPJMD	35.400.000	28.966.000	81,82
5.	Penyusunan rancangan RKPD	45.400.000	41.700.000	91,85
6.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	301.390.000	276.397.000	91,71
7.	Penetapan RKPD	45.000.000	36.400.000	80,89
8.	Koordinasi Penyusunan LKPJ	200.000.000	181.256.050	90,63

12. Program perencanaan pembangunan ekonomi

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	285.000.000	284.718.500	99,90
2.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	891.000.000	888.701.500	99,74
3.	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Daerah	644.500.000	630.658.000	97,85

13. Program perencanaan sosial dan budaya

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya	485.000.000	451.959.734	93,19

14. Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintah daerah	302.250.000	289.953.000	95,93
2.	Fasilitasi Peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	95.162.500	87.636.600	92,09
3.	Fasilitasi pada kegiatan kuliah kerja nyata (KKN)	92.735.000	84.216.500	90,81
4.	Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	150.000.000	137.957.000	91,97
5.	Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	25.000.000	21.749.500	87,00
6.	Koordinasi bidang penelitian pengembangan	84.000.000	68.255.700	81,26

2.1.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Secara umum target kinerja pada tahun anggaran 2016 tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan, beberapa kegiatan yang secara realisasi anggaran tidak dapat terpenuhi 100 % lebih banyak dipengaruhi adanya efisiensi belanja dan adanya faktor eksternal diantaranya diberlakukannya peraturan baru dan adanya perubahan rencana kegiatan dari pihak lain yang berpengaruh pada kegiatan bappeda, efisiensi dilakukan dalam upaya mengurangi pemborosan keuangan daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan melalui pendekatan yang efektif dan efisien.

Faktor lain yang dapat juga mempengaruhi capaian target kinerja / program adalah waktu pelaksanaan yang hampir bersamaan serta yang mengalami pengunduran waktu pelaksanaan. Agenda kegiatan pada Bappeda disamping didasarkan pada agenda perencanaan yang telah ditentukan juga dipengaruhi agenda kegiatan yang didasarkan pada tata waktu yang ditentukan oleh pihak lain khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

2.1.3 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra Bappeda 2016 – 2017, secara umum seluruh program / kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja lebih dari 99%. Berdasarkan target capaian program pada Renstra tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015 secara umum mampu memenuhi target capaian program pada renstra Bappeda Kabupaten Pematang Jaya. Ini menjadi awal yang baik untuk melangkah di tahun yang akan datang.

2.1.4 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program / kegiatan adalah agenda / tata waktu pelaksanaan kegiatan yang belum dapat ditentukan pada tahun perencanaan, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penyusunan perencanaan perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyusun jadwal kegiatan selama satu tahun dalam tahun perencanaan (n-1).

Tahun 2016 merupakan tahun ke 1 periode RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2011 – 2016, capaian program dan kegiatan pada tahun 2016 merupakan capaian kinerja tahun terakhir RPJMD Kab. Pemalang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 27 ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Renstra SKPD diatur dengan Peraturan penyusunan Renstra BAPPEDA ini berdasarkan/berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Pasal 16 Peraturan Bupati Pemalang No 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penanaman modal
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

BAPPEDA Kabupaten Pemalang pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah ditata kembali organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang termasuk Bappeda. Terakhir Bappeda Kabupaten Pemalang ditetapkan kembali penataan organisasinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

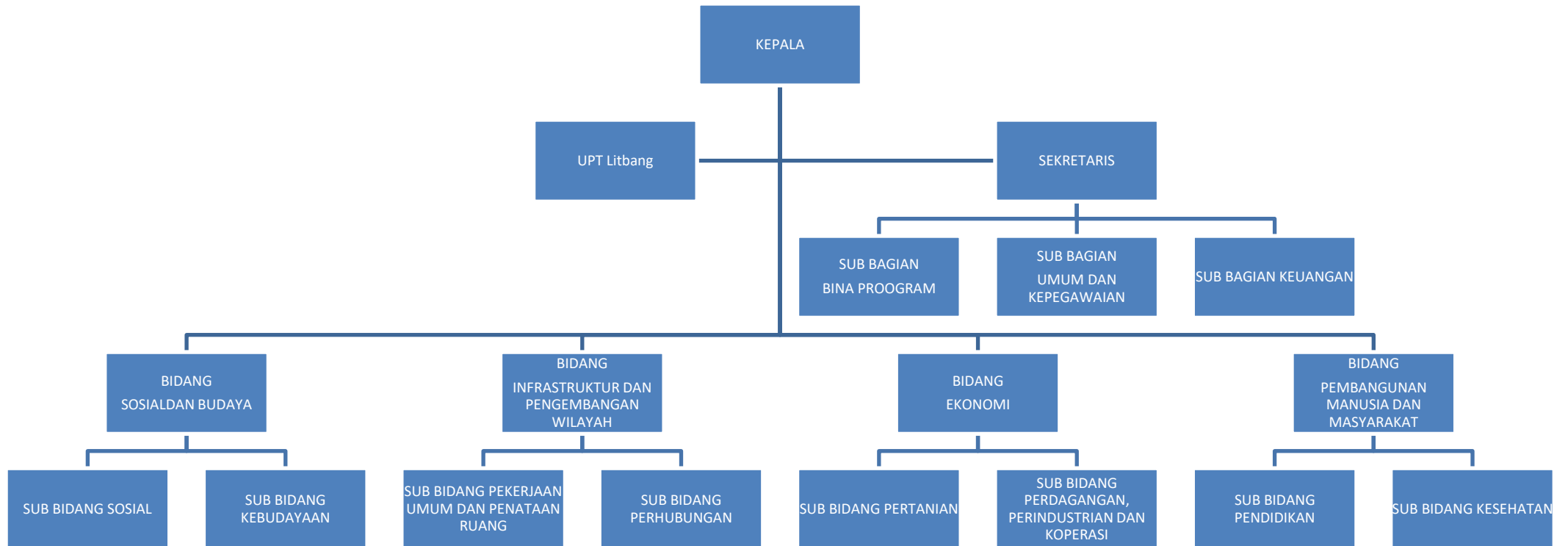
- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Bina Program
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Sosial
 - Sub Bidang Kebudayaan
- d. Bidang Ekonomi dan SDA, terdiri dari :
 - Sub Bidang
 - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Sub Bidang Perhubungan
- f. Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat
 - Sub Bidang Pendidikan
 - Sub Bidang Kesehatan
- g. Unit Penelitian dan Pengembangan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Eselonering jabatan pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Kepala BAPPEDA | = eselon II.b |
| b. Sekretaris | = eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | = eselon III.b |
| d. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang | = eselon IV.a |

Adapun struktur organisasi dan tata kerja BAPPEDA Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**



2.2.3 Sumber Daya SKPD

i. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA didukung oleh personil sebanyak 51 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Perincian Berdasarkan Jumlah Personil

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala BAPPEDA	1 orang
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	5 orang
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	11 orang
4.	Fungsional Tertentu (Perencana)	4 Orang
5.	Fungsional Umum (Pelaksana)	31 orang
Jumlah		51 orang

b. Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	SARMU	S 1	S 2	S 3	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang	-	-	-	-	2	3	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang	-	-	-	-	5	6	-	11
4.	Fungsional Perencana	-	-	-	-	-	4	-	4
5.	Fungsional Umum / Pelaksana	-	1	10	3	12	6	1	31
Jumlah		-	1	10	3	19	18	1	51

c. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris/Kepala Bagian/Bidang	-	-	-	6	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang	-	-	6	5	11
4.	Fungsional Tertentu (Perencana)	-	-	3	1	4
5.	Fungsional Umum (pelaksana)	1	13	18	1	31
Jumlah		1	13	25	13	51

d. Perincian Berdasarkan Diklat

NO	JABATAN	JUMLAH			JUMLAH
		II	III	IV	
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	1
2.	Kepala Bagian/Bidang	-	5	-	5
3.	Kepala Sub Bagian/Bidang	-	-	11	11

4.	Staf	-	-	-	-
Jumlah		1	5	11	17

e. Perincian Berdasarkan Umur

NO	KOMPOSISI MENURUT UMUR	JUMLAH
1.	Umur 20 – 30 Tahun	5
2.	Umur 31 – 40 Tahun	23
3.	Umur 41 – 50 Tahun	20
4.	Umur 51 Tahun ke atas	3
Jumlah		52

ii. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BAPPEDA Kabupaten Pemalang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada BAPPEDA Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	7 unit
2.	Sepeda Motor	30 unit
3.	Sepeda	2 unit
4.	Mesin Tik	1 unit
5.	Mesin Fotocopy	1 unit
6.	Lemari besi	11 buah
7.	Rak Kayu	9 buah
8.	Filling Besi	47 buah
9.	Brankas	1 buah
10.	Rotary filling	4 buah
11.	Lemari Kaca	19 buah
12.	Lemari Kayu	15 buah
13.	Papan Visuil	1 buah
14.	Alat Penghancur Kertas	7 buah
15.	Papan Pengumuman	5 buah
16.	Papan Tulis	4 buah
17.	Banner	4 buah
18.	Meja Pingpong	1 buah

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
19.	Meja Rapat	25 buah
20.	Meja tulis	40 buah
21.	Meja telepon	2 buah
22.	Meja podium	1 buah
23.	Kursi rapat	76 buah
24.	Kursi tamu	4 buah
25.	Kursi Tangan	8 buah
26.	Kursi Putar	21 buah
27.	Kursi biasa	41 buah
28.	Kursi Lipat	226 buah
29.	Meja computer	8 buah
30.	Tenda	1 buah
31.	Meja Biro	2 buah
32.	Jam mekanis	5 buah
33.	Lemari es	2 buah
34.	AC	25 buah
35.	Kipas Angin	25 buah
36.	Kompur gas	1 buah
37.	Tripod	4 buah
38.	Taplak Meja	10 buah
39.	Televisi	7 buah
40.	Cassette recorder	1 buah
41.	Amplifier	5 buah
42.	Sound system	14 buah
43.	Wireless	4 buah
44.	Microphone	4 buah
45.	Unit Power Supply	15 buah
46.	Dispenser	3 unit
47.	Handy Cam	10 unit
48.	Personal computer lainnya	10 unit
49.	P.C Unit	2 unit
50.	Lap top	10 unit
51.	Note Book	41 unit
52.	CPU	15 unit

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
53.	Hard Disk	7buah
54.	Printer	42 unit
55.	Scanner	3 unit
56.	Monitor	22 unit
57.	Flashdisk	48 unit
58.	Meja Kerja	9 unit
59.	Meja tamu	4 unit
60.	Kursi kerja	24 unit
61.	Lemari Buku	8 unit
62.	Proyektor	2 unit
63.	CD Player	3 unit
64.	Camera Electronic	13 unit
65.	Video Mixer	1 unit
66.	Slide Proyektor	3 unit
67.	Layar film	2 unit
68.	Telephone (PABX)	22 unit
69.	Facsimile	3 unit
70.	Antena Parabola	1 unit
71.	Mesin absensi	1 buah
72.	Mesin Penghisap Debu	1 buah
73.	AC Split	12 buah
74.	Electric benner	2 buah
75.	Running text	2 buah
76.	Alat Pemadam portable	3 buah
77.	Mainframe	1 buah
78.	Router	2 buah
79.	Telpon Mobile	1 buah
80.	Penyekat Ruangan	3 buah
81.	CCTV	12 buah
82.	Pompa Air	4 buah
83.	GPS	1 buah
84.	Rainer	1 buah
85.	LCD	10 buah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebelum melakukan penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan hasil analisis kebutuhan SKPD.

Usulan awal SKPD kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang, baik musrenbang desa maupun kecamatan dan kabupaten.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

Dari sasaran strategis yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan Program strategis dengan memperhatikan strategi dan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasara, Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Sasaran dan Program

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Prosentase jumlah program dalam RPJMD yang mendukung Program RPJMN	1. Program Kerjasama Pembangunan
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai SAKIP	3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD 4. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 5. Program Pengembangan Data dan informasi
2	Meningkatnya sarana prasarana dan Aparatur penunjang perencanaan	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana	6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan SDM yang berkualitas	8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan SDA	9. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi
4	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 11. Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar
5	a. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan	a. Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan	12. Program perencanaan sosial budaya

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
	Manusia dan Masyarakat	bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
	b. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya	b. Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya	
6	Meningkatnya dukungan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kebijakan pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan	13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.1. Kegiatan

Aktivitas atau kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program operasional yang berdimensi waktu 5 (lima) tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA pada Tahun 2016–2021 telah menetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan:

- Penyediaan jasa surat menyurat*
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas*
- Penyediaan jasa administrasi keuangan*
- Penyediaan jasa kebersihan kantor*
- Penyediaan alat tulis kantor*
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan*
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan*
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
- Penyediaan makanan dan minuman*
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*
- Penyediaan jasa keamanan*

- **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

Kegiatan:

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional*
- Pengadaan peralatan gedung kantor*
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor*

- d. *Pengadaan komputer dan perlengkapannya*
- e. *Pengadaan alat-alat elektronik*
- f. *Pengadaan mebeleur*
- g. *Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor*
- h. *Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*
- i. *Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional*
- j. *Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor*
- k. *Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor*
- l. *Rehab sedang/berat gedung kantor*
- m. *Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional*
- **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
kegiatan:
 - a. *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
 - b. *Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan*
 - c. *Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi*
- **Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
Kegiatan:
 - a. *Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*
 - b. *Penyusunan pelaporan keuangan semesteran*
 - c. *Penyusunan pelaporan prognosis*
 - d. *Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun*
- **Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
 - a. *Penyusunan data base perencanaan SKPD*
- **Program Pengembangan Data dan Informasi**
Kegiatan:
 - a. *Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan*
 - b. *Penyusunan Sistem informasi profil daerah*
 - c. *Penyusunan dan Pengumpulan data / Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemsosbud*
- **Program Kerjasama Pembangunan**
 - a. *Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga*
 - b. *Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya*
 - c. *Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang prasarana wilayah*
 - d. *Monitoring, evaluasi dan pelaporan*
 - e. *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang pendidikan*

- f. *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang ketenagakerjaan*
- g. *Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya*
- **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**
 - a. *Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh*
 - b. *Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh*
- **Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar**
 - a. *Koordinasi perencanaan penanganan perumahan*
 - b. *Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan*
- **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik*
 - b. *Penyusunan Rancangan RPJMD*
 - c. *Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD*
 - d. *Penetapan RPJMD*
 - e. *Penyusunan rancangan RKPD*
 - f. *Penyelenggaraan Musrenbang RKPD*
 - g. *Penetapan RKPD*
 - h. *Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)*
 - i. *Koordinasi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, dan ketenagakerjaan*
 - j. *Koordinasi bidang kesehatan, PP dan PA, pengendalian penduduk dan KB*
 - k. *Koodinasi Penyusunan Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran*
 - l. *Koordinasi sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah*
 - m. *Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah*
- **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

Kegiatan:

 - a. *Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat*
 - b. *Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi*
 - c. *Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi Daerah*
 - d. *FEDEP*
- **Program perencanaan sosial dan budaya**

Kegiatan:

 - a. *Penguatan kelembagaan Pendidikan Untuk semua {PUS}*
 - b. *Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)*
 - c. *Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)*
 - d. *Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat*
 - e. *Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa*

- f. Koordinasi perencanaan bidang sosial*
- g. Koordinasi perencanaan bidang kesejahteraan budaya*
- **Program Optimalisasi penelitian dan pengembangan**
 - a. Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah*
 - b. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan*
 - c. Fasilitasi pada kegiatan KKN*
 - d. Seminar dan Lokakarya hasil Penelitian dan pengembangan*
 - e. Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber*
 - f. Koordinasi bidang Penelitian dan Pengembangan*

Rencana Program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama jlima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017		
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	9	10	
Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan pembangunan daerah	meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Prosentase jumlah program dalam RPJMD yang mendukung Program RPJMN	a	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	1	300.000.000
		Nilai SAKIP	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun (Dokumen KUA PPAS 2016 - 2018, Renja dan Renstra SKPD, LKJIP dan LKPJ SKPD)	4 dokumen	300.000
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	b	Program Pengembangan Data dan informasi	Jumlah dokumen data yang tersedia	1	525.000
			1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah data/informasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	4 kajian	200.000
			2	Penyusunan dan analisis data / informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah	Jumlah studi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	1 studi	55.000
			3	Penyusunan sistem informasi profil daerah	Jumlah data informasi profil daerah	162 buku	35.000
			c	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah dokumen kerjasama	1	1.300.000
			1	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama dengan pemangku kepentingan	2 kegiatan	300.000
			2	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah bidang pemerintahan, sosial budaya	Jumlah kegiatan TKPKD, PLPBK, MP3KI,P2B, Desa Berdikari, P2KP	12 bulan, 1 kajian	765.000
			3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monev, evaluasi RKPD dan laporan tugas pembantuan yang dilakukan	15 kali, 60 buku, 4 laporan	130.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	9	10
			4 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang kesehatan	tersedianya dokumen kajian Perencanaan Bidang Kesehatan	2 studi	110.000
			5 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan	tersedianya dokumen kajian Perencanaan Bidang Pendidikan dan Ketenagakerjaan	2 studi	110.000
			6 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial dan budaya	tersedianya dokumen kajian Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya	2 studi	110.000
			d Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terpenuhi	1	300.000
			1 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terselenggaranya rakor Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4 rakor	150.000
			2 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen studi review masterplan agropolitan	3 studi, 6 rakor	75.000
			e Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan perkotaan	1	325.000
			1 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Jumlah rakor penanganan perumahan dan pemukiman yang terselenggara	6 kegiatan	90.000
			f Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah rakor penanganan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	10 kegiatan	300.000
			f Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang tersedia	1	1.686.000
			1 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah kegiatan pendampingan FEDEP dan kegiatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	3 kegiatan	327.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	9	10
			2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersusunnya profil investasi, keikutsertaan kegiatan expo produk unggulan di dalam dan luar provinsi, serta kegiatan rakor, 1 kali FGD	1 dokumen, 2 expo dan 8 kali rakor, 1 FGD	140.000
			3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah studi pemanfaatan potensi daerah dan penanganan lahan kritis daerah	1 studi, 1 rakor, 1 FGD	420.000
			4 FEDEP	Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP	5 kegiatan	200.000
			g Program perencanaan sosial budaya	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang tersedia	1	325.000
			1 Penguatan kelembagaan PUS (Pendidikan Untuk Semua)	Terselenggaranya Rakor dan Pendataan Anak Tidak Sekolah	1 kegiatan	40.000
			2 Koordinasi penanggulangan GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	Terselenggaranya rakor dan sosialisasi penanggulangan GAKY	3 rakor, 1 kegiatan	40.000
			3 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi TKPK, validasi data PDBT tahun 2015 dan tersusunnya LP2KD	1 tahun fasilitasi, 1 database kemiskinan, 1 kajian	250.000
			4 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan kualitas lingkungan pemukiman berbasis masyarakat	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi kota tanpa kumuh	1 tahun fasilitasi, 1 perda	850.000
			5 Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembangunan kawaan pedesaan, 1 perda	1 tahun fasilitasi, 1 perda	150.000
			6 Koordinasi perencanaan bidang sosial	Koordinasi fasilitasi permasalahan K3MKS, pemberdayaan CSR	1 tahun fasilitasi	75.000
			7 Koordinasi perencanaan bidang budaya	Koordinasi dan fasilitasi kebudayaan	1 tahun fasilitasi	75.000
			8 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya		0
			h Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	1.296.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	9	10
			1 Kegiatan Pelayanan jasa surat-menyurat	Jumlah surat yang terkirim	2000 surat	100.000
			2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan air yang terpenuhi	12 bulan	190.000
			3 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak dan disahkan STNK-nya	40 kendaraan	15.000
			4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan dan jumlah laporan daloptan	12 laporan, 120 bendel	75.000
			5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	365 hari	75.000
			6 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	2 paket	75.000
			7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	50.000
			8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik dan perbaikan instalasi listrik	12 bulan	30.000
			9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	25.000
			10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	12 bulan, 20 buku	30.000
			11 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai yang tersedia	11 bulan	100.000
			12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	450 kegiatan	450.000
			13 Penyediaan jasa keamanan	Jumlah jasa keamanan kantor dan lingkungan	12 bulan	90.000
			i Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	600.000
			1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	1 unit	250.000
			2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya genset dan perlengkapannya		0

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017		
					Target	Rp	
1	2	3	4	5	9	10	
			3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		0
			4	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	5 unit	25.000
			5	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah pengadaan alat-alat elektronik		0
			6	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebelair untuk menunjang kinerja		0
			7	Pengadaan tempat parkir dan area publik kantor	Terbangunnya gedung tempat ibadah	1 unit	200.000
			8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang terpelihara	1 unit	50.000
			9	emeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	50 unit	200.000
			10	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 jenis, 12 bulan	50.000
			11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis, 12 bulan	100.000
			12	Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab		0
			13	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya 40 unit notebook, 10 PC, 40 Printer, 1 Jaringan Internet	9 Jenis, 12 Bulan	100000
			14	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terehabnya pagar keliling kantor bappeda Kab. Pematang	2 Paket Pekerjaan	
			j	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	0	210.000
			1	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	75.000
			2	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan	2 kegiatan	60.000
			3	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti seminar dan workshop	16 orang	75.000
			k	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	0	65.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2017	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	9	10
			1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	10.000
			2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	1 laporan	25.000
			3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	30.000
		Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	l Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan realisasinya yang tersusun	1	1.500.000
			5 Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan RKPD yang tersusun	150 buku	60.400
			6 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan musrenbang RKPD	1 kegiatan	376.290
			7 Penetapan RKPD	Jumlah Perbup RKPD yang ditetapkan	150 buku	45.000
			8 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun	150 buku	200.000
			9 Koordinasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan olah Raga	Terselenggaranya kegiatan koordinasi	1 kegiatan	100.000
			10 Koordinasi Bidang Kesehatan, PP dan PA, Pengendalian penduduk dan KB	Terselenggaranya kegiatan koordinasi	1 kegiatan	100.000
			m Proqram Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya dokumen kajian penelitian dan pengembangan	1	325.000
			1 Kajian dan analisis pelaksanaan pemerintahan daerah	Jumlah kajian pelaksanaan pemerintahan daerah	1 kajian	55.000
			2 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan lomba kreasnova dan pameran kreasnova	2 kegiatan	80.000
			3 Fasilitasi pada kegiatan KKN	Jumlah fasilitasi pada kegiatan KKN	6 PT	75.000
			4 Seminar dan lokakarya hasil penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan seminar yang dilaksanakan	1 kegiatan	50.000
			5 Dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang tersusun	200 buku	25.000
			6 Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan yang dilakukan	1 kali	45.000

BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja Bappeda merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pematang Jaya tahun 2016-2021 dan disusun mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Renja (Rencana Kerja) Bappeda tahun 2017 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

Indikator yang ditetapkan dalam Renja (Rencana Kerja) ini sedapat mungkin menggambarkan suatu hasil kegiatan yang terukur. Dengan demikian penilaian yang dilakukan atas dasar Rencana Kerja diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

1.1 Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Keterlibatan *stakeholders* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang dan forum SKPD.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen perencanaan ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan oleh masing-masing sub bidang atau bagian. Dengan demikian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Bappeda sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



Ir. SUDARYONO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 19600722 199002 1 001